

**Judul** : DPR Bersemangat Gempur KPK: Gerindra dan PAN bebalik mendukung Hak Angket KPK  
**Tanggal** : Jumat, 09 Juni 2017  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 1

JAKARTA – Kritik keras terhadap pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi tak membuat langkah Dewan Perwakilan Rakyat surut. Kemarin, Pansus Hak Angket KPK menggelar rapat perdana untuk merumuskan mekanisme dan jadwal kerja serta menyepakati biaya kerja Rp 3,1 miliar untuk 60 hari ke depan. "Seharusnya tak ada masalah lagi," kata Ketua Pansus Hak Angket, Agun Gunandjar, di gedung DPR, Jakarta, kemarin. Dia menyatakan penggunaan hak angket telah sesuai dengan aturan.

Hak angket lahir berkaitan dengan kasus e-KTP. Komisi Hukum DPR menginginkan KPK membuka rekaman pemeriksaan politikus Hanura, Miryam S. Haryani, dalam perkara yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini. Dalam pemeriksaan itu, Miryam mengatakan ditenam enam anggota Komisi Hukum DPR agar mengatakan tidak ada pembagian uang e-KTP di Dewan. Belakangan, sikap Miryam berubah dan menuding ditekankan penyidik KPK agar mengatakan hal itu.

Meski diwarnai penolakan beberapa fraksi, pada 24 April lalu hak angket KPK disahkan.

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menyatakan pengesahan tersebut bermasalah. Menurut dia, keputusan pemimpin sidang, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, tidak sah karena tanpa meminta persetujuan semua fraksi.

Juga ada masalah dengan keterwakilan fraksi di Pansus Hak Angket KPK, kata Feri. Sesuai dengan Pasal 201 ayat 2 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), panitia angket harus diisi seluruh fraksi. Artinya, sepuluh fraksi di DPR harus masuk.

Tapi, hingga kemarin, baru tujuh fraksi yang bergabung, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai NasDem,

## DPR BERSEMANGAT GEMPUR KPK

Gerindra dan PAN bebalik mendukung hak angket KPK.

Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional.

Gerindra dan PAN, yang dalam rapat paripurna 30 Mei lalu masih menolak, akhirnya berbalik setuju dan mengirim wakil untuk duduk di Pansus. Yang bertuan menolak kini tinggal Fraksi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. "Jadi, hak angket KPK itu inkonstitusional dan cacat prosedur. Hak angket ini lahir akibat saking semangatnya DPR melemahkan KPK," ujar Feri. Ada kekawatiran gerakan angket ini akan berlanjut ke upaya merevisi Undang-Undang KPK.

Mengenai perubahan sikap mereka, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto berdalih, "Kami ingin proses ini sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi." Sedangkan politikus Gerindra, Muhammad Syafii, menyatakan mereka ikut Pansus karena hak angket telah disahkan dalam sidang paripurna. "Kami harus menghormati putusan paripurna DPR. Itu sah secara konstitusi," katanya.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan lembaganya sedang mengkaji legalitas hak angket itu dan apa sikap mereka nanti jika dipanggil Pansus. "Kami belum bersikap, akan datang atau tidak," katanya.

● HUSSEN ABRI DONGORAN / INORI MAULIDAR / AHMAD FAIZ / DANANG FIRMANITO

### PARTAI TAK KONSISTEN

Sikap partai politik terhadap hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal tak konsisten. Partai berubah-ubah pendirian dari saat pengesahan hak angket hingga pengajuan nama-nama anggota Panitia Khusus.

Sikap Sebelum Rapat Paripurna Hak Angket		Sikap dalam Rapat Pemilihan Pimpinan Pansus Hak Angket 7 Juni 2017
Belum bersikap	PDIP	Setuju
Menolak	Golkar	Setuju
Menolak	Gerindra	Setuju
Menolak	Demokrat	Menolak
Menolak	PKB	Menolak
Belum bersikap	PAN	Setuju
Belum bersikap	PKS	Menolak
Belum bersikap	NasDem	Setuju
Belum bersikap	PPP	Setuju
Setuju	Hanura	Setuju

DPR UBAH ATURAN DEMI MEMULUSKAN HAK ANGKET KPK

HALAMAN 4

